

MILITARY DIPLOMACY STRATEGY OF INDONESIA TO SOLVE SOUTH CHINA SEA CONFLICT IN 2014-2019

STRATEGI DIPLOMASI MILITER INDONESIA TERKAIT UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN TAHUN 2014-2019

Arif¹, Diva Alika Mesha Putri¹, Muhammad Fachrurrozi¹, Sheila Jessika¹

¹Prodi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Tanjungpura, Indonesia
Surel: aryfgeraldo19@student.untan.ac.id

Abstract

This study aims to describe the phenomena related to the 2014-2019 South China Sea conflict resolution efforts. The Indonesian government implements a military diplomacy strategy to minimize conflict in the region. Researchers obtained accurate and valid data sources using literature studies from books, websites and online journals as the primary sources of reference. With these sources, researchers can strengthen the theory and argument in this study. Researchers use defence diplomacy theory with the concept of strategy and national interests. Discussion on Indonesia's military diplomacy strategy related to efforts to resolve the 2014-2019 South China Sea conflict. Some of the main problems are how Indonesia's military diplomacy strategy includes two forms: First, building state military defence in the Natuna waters. Second, the application of Naval Diplomacy as a form of Indonesian military diplomacy strategy. The researcher concludes that Indonesia's two forms of diplomacy effectively minimize conflict in the South China Sea region. The military diplomacy strategy effort in securing Natuna waters is to build state military defence aimed at fulfilling proportional strength that focuses on increasing the strength of defence equipment and supporting infrastructure. The form of Indonesia's military diplomacy strategy is the Naval Diplomacy in the form of coalition building which carried out through efforts to manufacture, develop and trade defence equipment with various countries, especially countries in the ASEAN region and abroad.

Keywords: Military Diplomacy, South China Sea, Strategy

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan terjadinya fenomena terkait upaya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan Tahun 2014-2019. Pemerintah Indonesia menerapkan strategi diplomasi militer untuk meminimalisir konflik dikawasan tersebut. Peneliti berusaha memperoleh sumber data yang akurat dan valid menggunakan studi literatur dari buku, website dan jurnal online yang menjadi sumber utama dalam rujukkannya. Dengan sumber tersebut, peneliti dapat menguatkan teori, argumen dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori diplomasi pertahanan dengan konsep strategi dan kepentingan nasional. Pembahasan mengenai bentuk strategi diplomasi militer Indonesia terkait upaya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan Tahun 2014-2019. Beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana bentuk strategi diplomasi militer Indonesia yang meliputi dua bentuk: Pertama, membangun pertahanan militer negara dikawasan Perairan Natuna. Kedua, penerapan *Naval Diplomacy* sebagai bentuk strategi diplomasi militer Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa kedua bentuk diplomasi yang diterapkan Indonesia memiliki keefektifan dalam meminimalisir konflik dikawasan Laut Tiongkok Selatan. Upaya strategi diplomasi militer dalam mengamankan perairan Natuna yakni membangun pertahanan militer negara yang diarahkan untuk memenuhi kekuatan proporsional yang berfokus pada peningkatan kekuatan alutsista dan infrastruktur pendukung pertahanan. Kemudian, bentuk strategi diplomasi militer Indonesia, yaitu *Naval Diplomacy* berupa *Coalition Building* yang dilakukan melalui upaya pembuatan, pengembangan dan perdagangan alutsista dengan berbagai negara, terutama negara di kawasan ASEAN dan mancanegara.

Kata Kunci: Diplomasi Militer; Laut Tiongkok Selatan; Strategi.

Diajukan: 10 Oktober 2020

Direvisi: 20 Desember 2020

Diterima: 30 Desember 2020

Sitasi: Arif, Putri, D. A. M., Fachrurrozi, M., dan Jessika, S. (2020). Strategi Diplomasi Militer Indonesia Terkait Upaya Penyelesaian Konflik Laut Tiongkok Selatan Tahun 2014-2019. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25 (2), 131-148.

Pendahuluan

Dalam kancah internasional, masing-masing negara mempunyai kepentingan nasionalnya tersendiri sehingga tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan gesekan dengan kepentingan negara lain dan dapat memicu timbulnya konflik antar negara. Untuk mengatasi ketegangan yang terjadi tersebut negara menggunakan jalur diplomasi dalam mengamankan dan meraih kepentingan nasionalnya (Budyanto et al., 2018). Dalam meraih kepentingan nasionalnya, suatu negara selalu bertujuan memproteksi kontinuitas kehidupan dan keperluan tiap warga negaranya. Dalam usaha memproteksi keberadaan sebuah negara, maka pemerintah di suatu negara mempunyai strategi dan kekuasaan untuk mengendalikan dan menetapkan kebijakan di negaranya sendiri (Alunaza & Toy, 2017). Upaya tersebut tentu harus dilakukan demi terwujudnya citra positif Indonesia salah satunya melalui diplomasi pertahanan.

Diplomasi pertahanan merupakan kumpulan wawasan modern dan terus mengalami proses transformasi dari Studi Pertahanan dan Hubungan Internasional. Dalam studi Diplomasi Pertahanan ini, berbagai paham *western* terus mempengaruhi dan menguasai transformasi terhadap pola dan teori pada studi ini. Pengaruh ini akan menimbulkan hegemoni paradigma yang dapat menimbulkan bias teoritis apabila diterapkan dalam negara yang mengedepankan akar budaya timur akibat dari perbedaan nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, ilmu pertahanan dalam adat dan kebiasaan dari timur sudah menyajikan paham untuk mengkaji tentang pertikaian (perang), ketentraman,

keterampilan memerintah, berdiplomasi dan berencana (Avalokitesvari, et al., 2018). Dalam hal ini, diplomasi pertahanan penting untuk diterapkan dalam sebuah negara guna menjaga atau melindungi kedaulatan.

Kedaulatan merupakan suatu sasaran yang hendak dituju oleh masing-masing negara yang menyangkut tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut (Anggela, et.al., 2019). Salah satu kunci kesuksesan di dalam bidang proteksi maupun kedamaian Indonesia berdasarkan atas kepentingan nasional dan juga diupayakan sebaik mungkin pelaksanaannya. Akan tetapi dalam perkembangannya, *national capital* memunculkan banyak perubahan sehingga dapat menyebabkan akibat yang cukup berbahaya terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Pertama, Indonesia memiliki wilayah maritim yang strategis sehingga berpeluang dalam membuka segala bentuk ancaman yang lebih kompleks terkait isu-isu maritim dan perbatasan. Kedua, Indonesia masih belum konstan dari segi stabilitas keamanan sebab terus mengalami era transisi serta penyempurnaan dalam bidang terkait sasaran sebuah negara yang meliputi sosial dan budaya, politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan (Nugraha, 2017). Akibat banyak aktor negara yang mempunyai kepentingan di kawasan Asia Pasifik pada akhirnya menimbulkan banyaknya pertentangan dan konflik. Diantaranya seperti perpecahan diberbagai negara yang sampai detik ini terus diperbincangkan oleh berbagai pihak, yaitu sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Timbulnya perselisihan terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan pada kenyataannya telah melibatkan beberapa negara dalam konfliknya yang terjadi (Utomo, 2017).

Dilihat dari segi geografis, kawasan Laut Tiongkok Selatan mempunyai posisi yang strategis, baik dalam segi ekonomi hingga politik. Berdasarkan letak geografisnya Laut Tiongkok Selatan berada di sekitar lingkungan negara-negara berpantai yaitu Indonesia, Thailand, Tiongkok, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Luasnya kawasan Laut Tiongkok Selatan termasuk Teluk Siam yang dibatasi oleh Kamboja, Vietnam, Malaysia dan Thailand maupun Teluk Tonkin juga dikontrol oleh negara Tiongkok maupun Vietnam. Wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan daerah yang cukup strategis dalam bidang perniagaan (*Sea Lines of Trade*) maupun bidang komunikasi internasional (*Sea Lines of Communication*) serta sudah menyatukan dua samudra besar yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang dinilai cukup ekonomis.

Oleh karena itu, kawasan Laut Tiongkok Selatan saat ini merupakan kawasan yang paling sibuk di dunia yang disebabkan oleh hampir separuh perdagangan global melalui wilayah perairan tersebut. Lebih dari itu dikarenakan letak geografisnya yang begitu penting, berdasarkan sumber dari *United States Energy Information Administration (EIA)*, kapasitas SDA yang dimiliki kawasan Laut Tiongkok Selatan begitu banyak. Wood Mackenzie (konsultan energi) menyebutkan terdapat cadangan gas dan minyak dengan jumlah 2,5 miliar barel yang terdapat di wilayah Laut Tiongkok Selatan (Ibid). Sebagai bagian dari kawasan Laut Tiongkok Selatan, laut Natuna juga salah satu bagian dari perairan yang mempunyai kapasitas SDA yang sangat melimpah. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap kawasan Natuna, Indonesia perlu mengungkap berbagai upaya penting demi memajukan bidang kemaritiman Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia sudah mulai mengusung visi serta misi dalam memajukan bidang kemaritiman Indonesia dengan cara menjadi bagian dari poros maritim dunia. Dengan arti khusus bahwa Indonesia sudah secara aktif mencoba melakukan pengamanan maupun pembangunan secara menyeluruh di berbagai wilayah yang menjadi tempat perbatasan sebagai salah satu jalur masuk untuk nelayan-nelayan asing yang datang ke Indonesia (Hanifahturahmi, 2020). Dalam hal ini, Indonesia juga turut aktif dalam mengkomunikasikan bahwa pentingnya keamanan dan pertahanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan berbagai negara yang bersengketa di kawasan laut tersebut (Hanifahturahmi, 2020). Hal ini merupakan salah satu wujud kepentingan nasional dari negara Indonesia dalam upaya menciptakan diplomasi luar negeri guna memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional. Dalam upaya mendukung terciptanya diplomasi luar negeri untuk memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional, maka sangat dibutuhkan diplomasi militer yang tangguh dan unggul. Keadaan ini akhirnya mengharuskan diambilnya dua bentuk kerja sama, yaitu bilateral dan multilateral mengingat tidak ada negara manapun yang sanggup untuk menghadapi berbagai ancaman secara mandiri. Maka dari itu, dibentuklah kerja sama internasional guna mengembangkan kapabilitas hingga membangun bentuk kepercayaan antar berbagai negara yang terlibat.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat suatu gagasan dan analisa mengenai: Bagaimana Strategi Diplomasi Militer Indonesia terkait Upaya Penyelesaian Konflik Laut Tiongkok Selatan Tahun 2014-2019? Melalui tulisan ini, penulis berharap Indonesia dapat ikut andil dalam upaya penanganan konflik Laut Tiongkok Selatan melalui diplomasi militer. Penulis berharap juga dengan adanya strategi yang diterapkan Indonesia, maka konflik Laut Tiongkok Selatan dapat diminimalisir. Terdapat beberapa pokok pembahasan yang ingin penulis paparkan dalam tulisan ini yang berkaitan dengan Strategi Diplomasi Militer Indonesia Terkait Upaya Penyelesaian Konflik Laut Tiongkok Selatan Tahun 2014-2019 yaitu bagaimana bentuk strategi diplomasi militer Indonesia terkait upaya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi Tahun 2014-2019 yang meliputi dua bentuk: Pertama, pembangunan pertahanan militer negara di kawasan Perairan Natuna. Kedua, penerapan *Naval Diplomacy* sebagai salah satu bentuk strategi diplomasi militer Indonesia

Untuk mendukung pembahasan rumusan masalah, kami akan menggunakan teori diplomasi pertahanan, konsep strategi, dan konsep kepentingan nasional. Ketiganya kami jelaskan melalui ulasan literatur berikut. Pemahaman makna keamanan sendiri saat ini dalam diplomasi pertahanan sudah banyak mengalami perubahan, negara-negara secara global sudah tidak memaknai arti keamanan sebagai bentuk ancaman yang berasal dari negara lain maupun yang bersifat militer. Berbagai ancaman yang dirasakan oleh negara tidak hanya berasal dari negara-negara lain saja, namun ancaman yang datang juga berasal dari *non state actor* yang bersifat *transboundary*. Pembentukan diplomasi pertahanan dalam rangka menjaga kepentingan nasional sebuah negara, merupakan wujud dari kesadaran sebuah negara akan pentingnya perlindungan terhadap berbagai ancaman yang muncul. Bentuk diplomasi pertahanan di masa damai memanfaatkan berbagai infrastruktur dan kekuatan bersenjata untuk menjadi alat dari kebijakan keamanan hingga kebijakan di

luar negeri. Munculnya diplomasi pertahanan sebagai proses penggabungan dengan aktor di dalam negara (badan intelijen dan juga politisi) dan organisasi non pemerintah, bahkan masyarakat sipil juga ikut dalam proses diplomasi pertahanan yang dilakukan.

Diplomasi pertahanan dan diplomasi militer memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, diplomasi pertahanan berfokus untuk membenahi hubungan diantara negara-negara lewat alur formal ataupun informal. Sedangkan diplomasi militer fokus pada penggunaan kekuatan dari militer dalam tahap diplomasi mengenai sekumpulan isu keamanan. Hadirnya diplomasi pertahanan di tengah dunia saat ini, menjadi bagian terpenting dalam kebijakan pertahanan, keamanan dan juga kebijakan luar negeri pada suatu negara. Kondisi ini merupakan hasil dari kepercayaan dan juga bentuk dukungan berbagai negara dalam pertemuan multilateral untuk membahas persoalan keamanan pada tingkat regional hingga internasional (Saragih, 2018).

Dr. Fandy Tjiptono menyampaikan bahwa dalam bahasa Yunani, kata strategi sendiri mempunyai pengertian yaitu sebuah ilmu maupun seni untuk menjadi seorang model jenderal. Makna lain dari strategi juga dapat berupa rencana guna membagi kekuatan militer, penggunaannya hingga penempatannya di sebuah tempat tertentu dengan fokus mencapai tujuan yang diinginkan. Rangkuti juga berpendapat mengenai definisi strategi yang juga dapat diartikan sebagai bentuk perencanaan utama yang bersifat komprehensif dan berupa cara yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah di tetapkannya sesuai dengan misi yang sudah ditentukan sebelumnya. Lain hal menurut Joni dalam jurnal Anitah yang berpendapat bahwa definisi strategi sendiri adalah rencana yang berisikan sebuah siasat ataupun jalan dalam menggapai misi yang diinginkan dengan visi yang sudah ditentukan dan memanfaatkan seluruh bentuk sumber daya yang ada di negara tersebut (Sudarsono et al., 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menggunakan konsep strategi untuk menganalisa tindakan Indonesia dalam upaya penanganan isu konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dengan menggunakan konsep strategi, penulis berharap upaya atas tindakan Indonesia tersebut efektif dalam menyelesaikan konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menganalisa perilaku suatu negara. Menurut Hans J. Morgenthau (dikutip dalam Bidara et.al., 2018) kepentingan nasional adalah *“the concept of national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances.*

Kepentingan nasional bisa diartikan sebagai *“what’s good for nation as a whole in international affairs”*. Memiliki arti yaitu kepentingan nasional disusun guna mencapai kemasyuran sebuah negara, serta sebuah aturan yang dipandang dapat memberi sebuah keuntungan pada sebuah negara saat menjalankan hubungan kerja sama dengan negara lain. Beberapa negara secara universal memiliki kapasitas yang tidak sama, tiap-tiap negara mengetahui dengan pasti situasi kelebihan dari masing-masing negaranya. Oleh karena itu, setiap perwakilan negara berupaya membentuk jalinan kerja sama dengan baik agar dapat meraih kepentingan nasional yang sudah direncanakan. Implementasi dari

kepentingan nasional dalam kerja sama terdiri dari dua bentuk yaitu dalam bentuk bilateral dan multilateral.

Selain dari tujuan tiap negara yang telah dipaparkan pada penjelasan di atas, terdapat juga tujuan nasional yang sulit diprediksi, seperti prestise dan status. Prestise dan status merupakan salah satu bentuk kepentingan yang sulit diukur dan tidak pasti. Harapan negara-negara dalam mengetahui berbagai kemajuan politik, sosial dan budaya, teknologi, militer, dan lainnya juga termasuk pada klasifikasi ini. Berdasarkan atas kepentingan nasional, setiap aktor dalam negara seperti presiden, perdana menteri, dan raja terus berupaya dalam mengoptimalkan keuntungan yang dapat diperolehnya ketika menjalin kerja sama dengan negara-negara luar.

Untuk menjalin hubungan dalam konteks ini bisa dilakukan secara paksaan ataupun dengan menjalin kolaborasi antar negara. Kepentingan nasional serta kedaulatannya dipandang serupa sebagai sebuah alat, bersamaan dengan itu tujuan dari aksi tiap negara dalam lingkup global. Perbedaan mendasar dalam kepentingan nasional terbagi dalam dua sifat, yaitu mendasar dan tidak mendasar. Kepentingan yang mendasar memiliki kaitan dengan kesinambungan kehidupan dalam sebuah negara serta esensi penting sebagai cerminan dari kebijakan luar negerinya. Sebaliknya kepentingan tidak mendasar tidak berhubungan dengan keberadaan suatu negara tersebut, akan tetapi tetap dipertahankan dengan adanya kebijakan luar negeri. Kepentingan mendasar memaparkan bahwa sebuah kepentingan dapat dimanfaatkan pada situasi darurat dalam sebuah negara. Sedangkan kepentingan tidak mendasar membutuhkan proses yang panjang, akan tetapi hasil maupun kegunaannya bisa dimaksimalkan di masa mendatang pada kurun waktu yang lebih panjang (Bidara et al., 2018).

Keterlibatan Indonesia di kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan tindakan nyata atas penolakan secara langsung terkait pengklaiman pemerintah Tiongkok terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan. Selain itu juga Indonesia mengamankan wilayah teritorialnya berdasarkan letak geografis agar tidak terjadi tindakan pengklaiman oleh negara lain secara ilegal.

Metode Penelitian

Pengumpulan informasi dan data disetiap bentuk observasi literatur pada prinsipnya sangatlah mudah untuk dipahami, yakni melalui dokumen, ulasan pers, konsep atau teori yang saling berkaitan dengan objek penelitian. Umumnya informasi dan data yang didapatkan berupa tinjauan atau telaah pustaka. Arti lainnya seperti sebuah buku ataupun jurnal penelitian. Syarat pertama terkait dengan sumber informasi yang jelas dan dapat dipercaya bagi metode penelitian literatur adalah sebagai wujud dari pertanggungjawaban ilmiah (Muliawan, 2014).

Hasil penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif dengan objek kajian dalam tulisan ini adalah bentuk strategi diplomasi militer Indonesia. Akumulasi data dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai informasi data terkait upaya penanganan konflik di Laut Tiongkok Selatan melalui strategi diplomasi militer yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari studi literatur

berupa buku, jurnal *online* dan website internet yang terpercaya mengenai konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan.

Hasil dan Diskusi

Analisis Sengketa di Perairan Laut Tiongkok Selatan

Dalam diplomasi, terdapat beberapa komponen yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan negara. Salah satunya pada bidang militer yang memiliki fungsi terkait strategi untuk menjalankan diplomasi militer yang mencakup hubungan bilateral dan multilateral serta misi perdamaian dunia atau kemanusiaan (Prasetyo dan Sugeng, 2014). Jika membahas masalah kekuatan pertahanan Indonesia, maka secara tidak langsung hal tersebut juga berkaitan dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan setiap elemen bangsa (Josephine, et al., 2019). Setiap elemen bangsa yang terlibat tentu akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketahanan dan keamanan nasional negaranya. Dewasa ini, tantangan yang paling besar bagi setiap negara terutama Indonesia adalah dalam segi ketahanan dan keamanan nasional maupun internasional. Contoh keamanan nasional salah satunya adalah dengan adanya struktur pendukung dari dalam negeri seperti Tentara Nasional Indonesia dalam praktik militer sesuai dengan cita-cita nasional dan perwujudan kedaulatan negara Indonesia. Diplomasi militer hadir terhadap pengembangan strategi nyata atas kekuatan sebuah negara terlebih atas partisipasi Indonesia dalam menjawab isu dan tantangan global. Sedangkan, keamanan internasional merupakan perlindungan dan pertahanan seperti serangan dari negara-negara lain maupun ancaman terorisme (Haras, 2017).

Berdasarkan data pemeringkatan yang dilakukan oleh *Global Fire Power*, kekuatan militer dalam sebuah negara bisa dilihat melalui unsur pembentuknya. Dalam hal ini, terdapat 8 (delapan) unsur pembentukan kekuatan militer dalam sebuah negara menurut *Global Fire Power*, yaitu keuangan, logistik, geografi, sumber daya manusia, sumber daya alam, kekuatan darat, kekuatan udara dan kekuatan laut. Dalam ketiga kekuatan yang telah disebutkan diatas seperti kekuatan darat, udara, dan laut tentunya memerlukan alutsista dalam sistem persenjataannya. Hal ini dilakukan guna membentuk kekuatan militer yang kuat dan tangguh (Kompas Pedia, 2020). Dengan adanya kekuatan militer yang kuat dan tangguh tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa antar negara. Sebagai salah satu contohnya yaitu sengketa Laut Tiongkok Selatan yang notabennya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam proses penyelesaiannya.

Sengketa Laut Tiongkok Selatan dideskripsikan sebagai masalah yang paling kompleks dan sulit untuk diselesaikan dalam hubungan internasional. Bagi negara di kawasan Asia Timur misalnya Jepang, perairan di wilayah Laut Tiongkok Selatan mempunyai banyak nilai strategis dikarenakan lebih dari 80% impor minyak didistribusikan melalui perairan ini. Selain itu, perairan di Laut Tiongkok Selatan juga bagian dari rute ekspor-impor antara Jepang dan Korea Selatan dan negara di kawasan Timur Tengah, Afrika, Eropa dan sebagian Asia. Di sisi lain, Amerika Serikat ternyata juga memiliki kepentingan besar dalam menstabilkan dan melestarikan perdamaian di kawasan perairan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menunjukkan

pentingnya pergerakan militer mereka di seluruh dunia dalam melakukan keamanan global atau dengan tujuan untuk membela sekutu-sekutunya (Hanifahturahmi, 2020).

Terdapat 3 alasan utama yang menjadikan Laut Tiongkok Selatan termasuk ke dalam kawasan perairan rawan konflik besar pada saat ini maupun di era mendatang. Alasannya meliputi: *Pertama*, Laut Tiongkok Selatan adalah perairan yang mempunyai banyak SDA bernilai ekonomis terutama pada sektor minyak bumi dan sumber energi lainnya. Di kawasan ini juga meliputi sejumlah kumpulan pulau yang tersebar dan banyak diklaim oleh negara-negara di sekitar kawasan seperti Tiongkok dan Taiwan serta beberapa negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. *Kedua*, kawasan Laut Tiongkok Selatan juga memiliki letak dengan jalur yang sama dengan jalur lintasan berbagai kapal internasional yang melalui perairan selat Malaka dan salah satu zona tersibuk karena sebagai penghubung jalur perdagangan dari benua Eropa ke Asia dan benua Amerika ke Asia serta sebaliknya. Laut Tiongkok Selatan juga menghubungkan tiga daerah yang cukup utama, yakni Asia Timur, Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Selain itu negara yang mengklaim kawasan Laut Tiongkok Selatan tersebut, seperti Indonesia dan Singapura juga Amerika Serikat ternyata juga memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan dan kestabilan di kawasan Laut Tiongkok Selatan agar tetap terjaga (Nainggolan, 2013).

Ketiga, menurunnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan sebaliknya justru membuat pertumbuhan ekonomi di Tiongkok semakin meningkat dan menyebabkan banyak negara selain dari kedua negara tersebut berusaha untuk memperoleh dan mendapatkan kontrol terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan yang memiliki letak strategis dan dinamis tersebut. Dalam hal ini, baik Tiongkok dan Amerika Serikat sendiri sama-sama mengupayakan kepentingannya dengan mengamankan *energy security*-nya dengan usaha menguasai kawasan perairan tersebut. Padahal dulunya kawasan tersebut dikelola dan dikontrol bersama secara terkoordinasi dengan jalur diplomatik serta jalur resmi dan non resmi melalui upaya *self-restraint* untuk menghindari provokasi dan ofensif kekuatan bersenjata di kawasan perairan tersebut. Akan tetapi, pada masa kini beberapa negara cenderung melanggar dengan inisiatif menunjukkan kekuatan guna memperoleh tujuan tertentu. Justru terdapat negara yang mencoba menggunakan aksi berupa intimidasi halus dan ancaman berupa kekuatan militer di lapangan, baik secara sepihak maupun secara berkelompok atau bersekutu (Nainggolan, 2013).

Klaim Tiongkok Terhadap Perairan Laut Tiongkok Selatan dan Upaya Indonesia Dalam Meminimalisir Konflik di Wilayah tersebut Melalui Visi Poros Maritim Dunia

Dalam lingkup regional, kawasan Asian Tenggara merupakan kawasan bagi negara-negara yang semuanya hampir memiliki sengketa batas yang belum bisa diselesaikan terkhususnya mengenai isu perbatasan di Laut Tiongkok Selatan yang masing-masing diklaim oleh negara Tiongkok dan Taiwan serta empat negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam (Anwar, 2014). Jika dilihat dari beberapa tahun kebelakang, dinamika terkait isu perdamaian di kawasan Asia Tenggara kembali mengalami perubahan akibat dari hadirnya Tiongkok sebagai *new power* di Asia.

Salah satu bentuk dari *new power* Tiongkok tersebut mengarah pada kebijakan mereka di wilayah Asia Tenggara terkait kepentingannya di perairan Laut Tiongkok Selatan (Rusfiana, 2014).

Selanjutnya pada tahun 2012 silam, pemerintah Tiongkok secara tiba-tiba melakukan klaim secara mutlak terhadap seluruh wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari para *claimant country* dan *non claimant country* disekitarnya serta negara-negara di luar kawasan yang memiliki stabilitas dan kontrol keamanan terhadap wilayah perairan tersebut. Kekhawatiran tersebut meningkat dan pada akhirnya memicu ketegangan yang semakin meningkat akibat dari munculnya berbagai manuver militer dan rasa ingin menunjukkan kekuatan angkatan bersenjata serta upaya saling memprovokasi dan mengintimidasi di perairan Laut Tiongkok Selatan. Di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan yang notabennya sudah mereka klaim secara mutlak, pemerintah Tiongkok memperlihatkan perilaku agresif dengan melakukan beberapa upaya provokasi terhadap para nelayan dan angkatan bersenjata asal Filipina dan Vietnam. Hingga belakangan ini juga, aksi provokasi berupa saling cegah dan usir di kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan yang dipersengketakan tersebut semakin meningkat dan mengarah pada timbulnya konflik berskala rendah (*low intensity conflict*) dan bisa membuka kemungkinan munculnya konflik bersenjata berskala besar dengan intensitas yang tinggi (*high intensity conflict*) apabila resolusi konflik yang konstan tidak berhasil ditemukan apalagi mengingat besarnya kepentingan terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan tersebut dari para negara yang mengklaim dan tidak mengklaim (*claimant dan non claimant states*), serta negara di luar kawasan laut tersebut (Rusfiana, 2014).

Perairan Laut Tiongkok Selatan memiliki potensi besar di kawasan Asia pasifik dan mengingat pentingnya keberadaan wilayah ini. Hal ini menyebabkan Laut Tiongkok Selatan akhirnya menjadi kawasan rawan akan konflik dan memiliki implikasi yang cukup besar dikemudian hari jika konflik bersenjata pecah di wilayah perairan tersebut. Maraknya kabar yang mencuat mengenai kekayaan SDA yang ada di kawasan Laut Tiongkok Selatan, dan berbagai tindakan penuh gejolak semenjak dilaksanakannya oleh negara-negara yang secara langsung berbatasan dengan laut tersebut dan berusaha mengklaim wilayah tersebut sebagai milik negaranya (Hartati, 2016).

Aksi klaim sepihak Tiongkok terhadap kedaulatan Laut Tiongkok Selatan telah memunculkan ketegangan antar negara-negara yang juga berhak atas kedaulatan di wilayah tersebut. Adapun negara-negara tersebut meliputi Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Indonesia (CNN Indonesia, 2020). Secara khusus, Indonesia tidak pernah sekalipun mengklaim bahwa mereka mempunyai kepentingan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Akan tetapi, klaim mutlak yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2012 terhadap seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan, termasuk seluruh pulau dan kepulauan yang ada dalam zona wilayah nasional turut mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia, terutama di wilayah perairan Natuna. Perebutan wilayah dan kekuasaan terhadap Laut Tiongkok Selatan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sejak lebih dari satu dekade, pemberitaan dari berbagai media massa tetap memperlihatkan situasi memanas akibat konflik yang terjadi di kawasan

tersebut (Haryanto & Bakhtiar, 2015). Dengan adanya klaim mutlak yang dilakukan pemerintah Tiongkok, tidak serta-merta berfokus pada kedaulatan wilayah Indonesia terhadap kepulauan Natuna saja yang terancam, tetapi seluruh kepentingan nasional negara Indonesia juga ikut terkena dampaknya sebagai negara kepulauan yang berlandaskan konsep wawasan nusantara dan berdasarkan konsep *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 begitu dihormati eksistensinya. Padahal tanpa klaim mutlak yang dilakukan pemerintah Tiongkok sekalipun, hak-hak tradisional nelayan Indonesia yang ada di sekitar perairan Natuna sudah terancam (Nainggolan, 2013). Pemerintah Indonesia seharusnya memperketat penjagaan di kawasan perbatasan, seperti perairan Natuna. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

Pertahanan negara Indonesia diartikan sebagai sebuah bentuk kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan nasional (Gumilar, et al., 2017). Dalam hal ini, pembuatan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional tentu harus mengedepankan upaya perdamaian internasional. Presiden Joko Widodo mulai melakukan upaya perdamaian internasional dengan membuat sebuah rencana untuk menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia sebagai upaya untuk membantu mengurangi sengketa yang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan. Tak lama setelah itu, Tiongkok hadir di masalah pulau Natuna dengan menggunakan kapal perang untuk merebut hak atas klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Untuk meminimalisir konflik tersebut, Indonesia melalui Presiden Jokowi dodo berupaya mengusung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mengingat Indonesia memiliki wilayah perairan yang dominan dan merupakan negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Pemerintahan Indonesia berupaya menjadikan negaranya sebagai poros maritim dunia dengan melihat potensi tersebut. Jika Pemerintahan Indonesia ingin menjadikan negaranya sebagai poros maritim dunia, maka setidaknya pemerintahan harus bisa membangun dan menciptakan kekuatan militer yang kuat dan strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan mulai meningkatkan kualitas dan kuantitas armada perdagangan hingga armada militer atau angkatan laut.

Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat beberapa upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan negaranya sebagai poros maritim dunia guna mewujudkan perdamaian di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Diantaranya yaitu, Pertama, melakukan konservasi *biodiversity* dan rehalibitasi dan akibat kerusakan lingkungan di perairan Natuna sebagai bagian dari Perairan Laut Tiongkok Selatan. Kedua, melakukan revitalisasi terhadap berbagai sektor ekonomi kelautan. Ketiga, melakukan pengembangan dan memperkuat konektivitas atau jaringan maritim. Keempat, menegakkan kedaulatan di perairan laut NKRI. Kelima, meningkatkan berbagai aspek penting terkait kuantitas dan kualitas SDM kelautan seperti dengan melakukan kerja sama militer dan peningkatan alutsista angkatan laut. Keenam, meningkatkan pembangunan infrastruktur, sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum keamanan, khususnya di wilayah Perairan Natuna sebagai bagian dari Laut Tiongkok Selatan (Kompas.com, 2020).

Pembangunan Pertahanan Militer Negara di Kawasan Perairan Natuna Sebagai Bentuk Strategi Militer Indonesia

Upaya pembangunan pertahanan negara di kawasan Perairan Natuna merupakan bentuk strategi militer Indonesia yang pertama. Bentuk strategi ini dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik. Adapun bentuk pembangunan secara non fisik yaitu dengan melakukan latihan militer gabungan dengan negara lain dikawasan Perairan Laut Tiongkok Selatan. Latihan militer gabungan merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional di bidang pertahanan.

Dalam instrumen diplomasi pertahanan, kerja sama internasional menitikberatkan pada kepentingan nasional sebagai indikator yang harus diwujudkan dalam bidang pertahanan melalui berbagai langkah nyata yang menguntungkan. Kerja sama dalam bidang pertahanan dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan stabilitas keamanan di lingkup kawasan (Diannita, Suhirwan & Sianturi, 2019). Dalam mewujudkan stabilitas keamanan tersebut, maka diperlukan peran militer dalam menjaga kedaulatan wilayah dalam suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya militer dalam berdiplomasi. Upaya tersebut dapat digunakan mengingat sering terjadinya ketegangan akibat konflik kepentingan antar negara di lingkup kawasan. Hal ini tentu dapat kita lihat pada konflik di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan beberapa negara termasuk Indonesia.

Sebagai upaya diplomasi militer dalam rangka membangun pertahanan militer negara untuk meminimalisir ketegangan dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, negara Indonesia berencana melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat di wilayah perairan laut Natuna. Tujuan dari dilaksanakan latihan militer ini bukan hanya sebagai *Show of Force*, akan tetapi juga bertujuan untuk mengukur kekuatan atau kapabilitas personil (Kusuma et.al., 2019). Dalam hal ini, Indonesia sudah dua kali melakukan latihan bersama dengan Amerika Serikat di Batam dengan jarak sekitar 480 km dari kepulauan Natuna. Dari latihan bersama yang dilakukan meliputi pemanfaatan akan pengawasan dan pesawat patroli seperti pada latihan penggunaan pesawat P-3 Orion untuk mendeteksi kapal selam dan juga kapal dipermukaan. Menindaklanjuti kegiatan tersebut, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa latihan gabungan tersebut menelan biaya sekitar US\$14,2 juta (Rp196 milyar) dalam upaya memperkuat pangkalan militer di kepulauan Natuna. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menekankan jika penguatan militer itu bukan sebagai upaya pencegahan akan munculnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan yang semakin meningkat. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia justru lebih suka menganggapnya sebagai diplomasi pertahanan.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi menekankan bahwa negara Indonesia tetap berkeinginan sebagai perantara yang bersih di dalam konflik yang terus terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk terlibat dalam perselisihan yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, Indonesia secara perlahan meningkatkan kekuatan eksistensi militernya di wilayah Natuna sebagai peringatan indikasi jika negara Indonesia tidak mau menjadi sasaran. Di sisi lain, Menteri Pertahanan RI menegaskan bahwa militer Indonesia sudah mempersiapkan pesawat jet dan kapal perang untuk mengontrol dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI dan tidak akan

menembak apabila terdapat kapal perang asing yang lewat di perairan Natuna (BBC News Indonesia, 2016).

Selanjutnya bentuk strategi militer Indonesia berupa pembangunan fisik yaitu melalui pembelian alutsista dan pembangunan infrastruktur di bidang pertahanan dikawasan Perairan Natuna. Upaya strategi diplomasi militer ini dilakukan guna mengamankan perairan Natuna dengan melakukan upaya pembangunan pertahanan militer negara yang diarahkan guna memenuhi kekuatan proporsional yang berfokus pada peningkatan kekuatan alutsista dan infrastruktur pendukung pertahanan. Dalam hal ini, sistem pertahanan militer direalisasikan dengan pengembangan implementasi yang nyata berupa patroli serta latihan secara mandiri atau pun dengan negara lain dengan memanfaatkan komponen alutsista berawak dan tanpa awak yang tentunya harus berpedoman pada *Rule of Engagement* (RoE) dalam usaha perlindungan SLOC dan SLOT pada kawasan laut Natuna (Wahyuni, 2019).

Dalam menjaga dan melindungi negara dari ancaman eksternal, setiap negara tentu mempunyai kebijakan pertahanannya masing-masing. Ada pun salah satu kebijakan yang kerap dilakukan dalam menjaga dan melindungi negara dalam aspek pertahanan negara yakni dengan peningkatan alutsista guna memperkuat militer (Amrullah, 2016). Salah satu kebijakan pertahanan dan keamanan dalam upaya merespons berbagai konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan yaitu dengan meningkatkan anggaran untuk revitalisasi dan penambah alutsista terutama dalam pembelian pesawat dan kapal serta persenjataan guna menjangkau kawasan perbatasan di Natuna (Arifianto, 2018). Melalui pengukuhan dalam sektor pertahanan, negara Indonesia yang diwakili Tentara Nasional Indonesia sudah melaksanakan berbagai upaya konkret demi memperkuat kawasan Natuna yang secara lansung berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini, Indonesia akan membangun perluasan *runway* untuk pesawat logistik berbadan besar. Lalu, pemerintah membangun dua pelabuhan militer dalam upaya memuat berbagai kapal perang untuk bersandar agar dapat mempermudah keluar masuknya kapal-kapal tersebut. Terakhir, dalam menjaga pulau Natuna Pemerintah Indonesia akan membangun markas Batalyon Infanteri Raider (Amrullah, 2016: 31-32).

Bentuk strategi diplomasi militer berupa pembangunan fisik dengan menyediakan kelengkapan alutsista sebagai usaha penopang dalam setiap pengendalian seperti melakukan patroli dan membangun berbagai infrastruktur pertahanan diharapkan mampu menjawab tantangan di masa depan mengingat ketegangan di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang semakin meningkat. Di sisi lain, dari hasil dokumen dalam studi terkait strategi pertahanan negara dalam upaya menghadapi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, pada konteks mengembangkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat Natuna, dalam rangka menciptakan revolusi mental diperlukan adanya wujud kesadaran akan bela negara yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, maka Kementerian Pertahanan dan pemerintah pusat bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di kabupaten pulau Natuna saling bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut (Amrullah, 2016: 32).

Terlepas dari klaim 9 garis putus-putus Tiongkok, ternyata konflik antara Indonesia dan negara lain turut menjadikan kawasan Laut Tiongkok Selatan sebagai kawasan yang cukup rawan dengan penggunaan kekuatan militer yang ofensif yang mengakibatkan timbulnya kemungkinan perang terbuka. Indonesia adalah negara yang sangat mengutamakan kedaulatan juga keamanan nasional di negaranya dan begitu terlihat bagaimana gerakan baru Indonesia dalam meningkatkan kekuatan militernya dengan peran besar dan menyeluruh, seperti yang terlihat pada matra laut (TNI-AL) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun demikian, berdasarkan kebijakan luar negeri Indonesia sendiri dan peranannya selaku pemimpin atau koordinator *de facto* ASEAN, negara Indonesia juga sangat berhubungan penting di dalam kontribusinya secara spontan dalam upaya resolusi konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan guna mendapatkan kestabilan, perdamaian juga keamanan secara regional di kawasan Asia Tenggara hingga Asia Pasifik (Satwika & Poesjoedho, 2019).

Dari sekian banyak upaya yang dilakukan, terdapat salah satu upaya yang sangat menarik perhatian, yaitu memanfaatkan kekuatan militer yang sudah diperbaharui sebagai wujud dari diplomasi Indonesia pada konflik yang terjadi. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa dalam situasi saat ini TNI sedang dalam tahap meningkatkan bentuk diplomasi militernya untuk memberi dukungan pada diplomasi luar negeri agar dapat memperkokoh kedudukan Indonesia di dunia internasional yang begitu banyak permainannya. Pada kerja sama yang dijalin dengan berbagai negara, tentunya memiliki kumpulan target yang wajib ditekankan, diantaranya pembangunan interoperabilitas, peningkatan kemampuan, dan juga pembangunan akan kepercayaan diantara negara-negara yang terlibat di dalamnya (Satwika & Poesjoedho, 2019).

***Naval Diplomacy* Sebagai Bentuk Strategi Militer Indonesia**

Dalam angkatan laut, fungsi diplomasi memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut berhubungan dengan manajemen terkait kebijakan luar negeri yang berbentuk pengerahan secara terbatas oleh angkatan laut. Pada hakekatnya, diplomasi angkatan laut atau *Naval Diplomacy* hanya dapat berlaku apabila penggunaan kekuatan dalam tindakan tersebut memiliki relevansi dalam mencapai *prestige* (Sirmareza, 2017). Adapun salah satu wujud dari *prestige* yang ingin dicapai tersebut adalah dengan mewujudkan negara maritim yang kuat dan tangguh.

Dalam rangka mewujudkan negara maritim yang kuat dan tangguh, maka diperlukan langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut guna merevitalisasi cara pandang dan kebijakan yang sejauh ini hanya berorientasi pada daratan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dodo melalui kebijakan Poros Maritim Dunia berupaya untuk membangun dan menegakkan serta melindungi kedaulatan maritim Indonesia melalui keamanan maritim (Agung & Kusuma, 2017). Salah satu bentuk dari keamanan maritim tersebut dapat dilakukan melalui *Naval Diplomacy*.

Bentuk strategi diplomasi militer Indonesia yang selanjutnya yaitu melalui *Naval Diplomacy* atau diplomasi angkatan laut berupa *Coalition Building* yang dapat dilakukan melalui upaya pembuatan, pengembangan dan perdagangan alutsista dengan berbagai negara, terutama negara di kawasan ASEAN dan juga termasuk negara di dunia yang

melakukan klaim secara ganda (sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih) di kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan negara Indonesia. Salah satu kerja sama di bidang pertahanan dalam bentuk pengembangan industri pertahanan tersebut telah mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan strategis yang ada di Indonesia (Luerdi & Marisa, 2019). Jika dilihat dari beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjalin bentuk kolaborasi dalam hubungan kerja sama bersama berbagai negara ASEAN diantaranya Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand serta negara di luar ASEAN dalam pengembangan dan penjualan alat alutsista yang dominannya terdiri dari berbagai alutsista angkatan laut (Agung & Kusuma, 2017: 256-257).

Indonesia harus mempunyai kesiapan terhadap segala bentuk konflik yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Hal tersebut termasuk kemungkinan terburuk yang mengharuskan Indonesia untuk terlibat dan bertahan dari ancaman militer. Lebih lanjut Ryan Muhammad menjelaskan bahwa isu klaim pemerintah Tiongkok terhadap perairan dan kepulauan Natuna yang dihadapi Indonesia menunjukkan ancaman yang berskala sedang (Arifianto, 2018). Maksudnya gangguan terhadap pertahanan dan keamanan kemungkinan bisa terjadi pada level tertentu. Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia cenderung menggunakan strategi pertahanan berbasis defensif aktif dengan mengutamakan kerja sama untuk menghadapi sengketa di wilayah terluar termasuk pulau-pulau kecil di Indonesia. Kebijakan pertahanan tersebut dikenal sebagai *defense support prosperity* dengan menempatkan sektor pertahanan dan operasi militer di berbagai pulau kecil sekaligus terluar dalam rangka menjaga kedaulatan negara serta membantu menjaga keamanan demi terlaksananya berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya sebagai upaya penunjang perekonomian (Arifianto, 2018).

Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk strategi diplomasi militer Indonesia terkait upaya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan Tahun 2014-2019. Dalam pergaulan internasional, masing-masing negara tentu mempunyai tujuan dari kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Tentunya kepentingan nasional setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak jarang perbedaan tersebut menimbulkan gesekan dengan kepentingan negara lain dan dapat memicu timbulnya konflik antar negara. Dewasa ini, tantangan yang paling besar bagi setiap negara terutama Indonesia yaitu mengenai ketahanan dan keamanan dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam hal ini, munculnya sengketa di perairan Laut Tiongkok Selatan dideskripsikan sebagai masalah paling kompleks dan sulit untuk diselesaikan.

Untuk meminimalisir konflik tersebut, Presiden Joko Widodo mulai melakukan upaya perdamaian internasional dengan membuat sebuah rencana untuk menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia demi mencapai upaya untuk membantu mengurangi sengketa di tengah perairan Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah Indonesia menerapkan strategi diplomasi militer sebagai bentuk tindakan dalam meminimalisir sengketa pada perairan Laut Tiongkok Selatan guna mengamankan perairan Natuna yakni dengan melakukan latihan militer gabungan dan pembangunan pertahanan militer negara yang ditujukan demi memenuhi potensi besar yang lebih sebanding dan berfokus pada

pengembangan kemampuan terhadap kelengkapan alutsista dan infrastruktur penopang di bidang pertahanan. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi *Naval Diplomacy* atau diplomasi angkatan laut berupa *Coalition Building* melalui upaya pembuatan, pengembangan dan perdagangan alutsista dengan berbagai negara terutama di kawasan ASEAN dan juga termasuk negara di berbagai mancanegara.

Saran

Mengingat bahwa perairan Laut Tiongkok Selatan adalah bagian dari wilayah Asia Pasifik yang mempunyai banyak potensi besar di dalamnya. Maka dari itu, hal ini menyebabkan Laut Tiongkok Selatan dipandang sebagai perairan laut yang berpotensi rawan akan munculnya konflik dan memiliki implikasi berskala luas dikemudian hari jika konflik bersenjata pecah di wilayah perairan tersebut. Dalam upaya mewujudkan perdamaian dikawasan tersebut, perlu ditekankan bahwa setiap negara harus menghormati hukum internasional dan mencegah rivalitas kekuasaan antar negara di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Penerapan *Declaration of Conduct* harus dilakukan secara efektif dan untuk mencegah ketegangan di kawasan tersebut, semua pihak yang terlibat dalam konflik harus menghentikan setiap kegiatan yang dapat memicu ketegangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D.S & Kusuma, A.H (2017). Menata Pangkalan Angkatan Laut Guna Memperkuat Kedaulatan Maritim Indonesia. *Jurnal Studi Diplomas Dan Keamanan*. Vol 9, No 1. Hal 1-15. Diambil dari: <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/view/2481>
- Alunaza, H. & Toy, B.A. (2017). Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017. *Jurnal Universitas Tanjungpura Pontianak*. Vol. 15, No. 1. Hal. 27-39. (<https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2963.149-162>).
- Ambarwati, E., dkk. (2019). Strategi Hedging dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus: Alih Teknologi Rudal C-705). *Jurnal Diplomas Pertahanan*. Vol. 5, No. 1. Hal. 27-46. Diambil dari: <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/362>
- Amrullah, M.R. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Turki: Studi Kasus Kerja sama Industri Pertahanan. *Jurnal Pertahanan*. Vol. 6, No. 1. Hal. 151-167. Diambil dari: <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/299>
- Anwar, S. (2014). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan Agustus*. Vol. 4, No. 2. Hal 71-93. Diambil dari: <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/332>
- Arifianto, A. (2018). Kebijakan Indonesia Terhadap Isu Konflik Blok-Natuna di Laut Cina Selatan (2014-2018). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Hal 114-143. Diambil dari: <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25204>
- Avalokitesvari, N., dkk. (2018). Analisis Diplomasi Pertahanan Negara Dalam Pandangan Chanakya (Studi Teks Arthashastra Sebagai Dasar Strategi Diplomasi Pertahanan).

- Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan. Vol. 4, No. 2. Hal 85-110. Diambil dari:
(<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/324>)
- Balontia, Meitty J., dkk. (2019). Grand Strategy Poros Maritim Dunia Berhadapan dengan Belt and Road Initiative dalam Konteks Diplomasi Pertahanan. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*. Vol. 5, No. 2. Hal. 21-49. Diambil dari:
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/413>
- Bhatnagar, T. (2016). *Mengapa Indonesia Menambah Kekuatan Militer di Natuna?*. BBC News Indonesia. Diambil dari link:
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230_dunia_indonesia_natuna (Diakses 6 Oktober 2020).
- Bidara, M.A, Mamentu. M & Tulung, T. (2018). Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 1, No. 1. Hal 1-15. Diambil dari:
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20020>
- CNN. (2020). *Laut China Selatan dan Gelombang Sengketa*. CNN Indonesia. Diambil dari link: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200616122338-113-513805/laut-china-selatan-dan-gelombang-sengketa> (Diakses 6 Oktober 2020).
- Diannita, A., Suhirwan, Sianturi, D. (2019). Diplomasi Pertahanan Republik Indonesia Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Pertukaran Perwira Siswa Angkatan Laut Australia di Seskoal Tahun 2013-2017). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. Vol. 5, No.1. Hal. 1-26. Diambil dari:
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/361>
- Gitiyarko, V. (2020). *Alutsista dan Kekuatan Militer Indonesia*. Kompas Pedia. Diambil dari link: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/alutsista-dan-kekuatan-militer-indonesia> (Diakses 6 Oktober 2020).
- Gumilar, N., dkk. (2017). Pengiriman Pasukan Garuda Sebagai Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Rangka Peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*. Vol. 3, No. 3. Hal. 83-106. Diambil dari:
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/187>
- Hanggu, F.P. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Kepada Negara Anggota Five Power Defence Arrangement (Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Inggris) Tahun 2000-2017. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*. Vol. 4, No.1. Hal. 1-20. Diambil dari: <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/201>
- Hanifahturahmi. (2020). Komunikasi Internasional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Sengketa Laut Cina Selatan di Natuna Utara. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*. Vol. 3, No. 2. Hal. 1-11. Diambil dari:
doi.org/10.36341/jdp.v3i2.1380
- Hartati, A.Y. (2016). Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Jokowi). *Jurnal Universitas Wahid Hasyim Semarang*. Vol. 1, No. 2. Hal. 1-26. Diambil dari:
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SD/article/download/1710/1781>
- Hematang, F.A.R., Pedrason, R., & Wahyudi, B. (2019). Diplomasi Pertahanan Indonesia di Negara Kawasan Pasifik Selatan Terkait Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. Vol. 5, No. 2

- Hal. 87-106. Diambil dari:
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/415>
- Luerdi & Marisa, H. (2018). Civil Participation in Military Innovation: Cooperation between the Defense Industry of Indonesia and Turkey 2010-2018. *Jurnal Global Strategis*, Vol. 5, No.2. Hal. 17-34. Diambil dari: <http://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/12863>
- Muhammad, H.Y. (2017). Peran TNI AL Dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan. *Jurnal Universitas Pertahanan*, Vol. 3, No.2. Hal. 1-14. Diambil dari: <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/144>
- Muliawan, J. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Naingolan, P. (2013). Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Nugraha, M.H. (2017). Perencanaan Strategis Pertahanan Masa Depan Indonesia: Analisis Pada Lingkungan Strategis Asia Tenggara (ASEAN) Periode 2015-2020. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol. 7, No.3. Hal. 157-167. Diambil dari: <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/235>
- Paramasatya, S., & Poespojoedho, W.W. (2019). Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional Tahun XII*, No. 2. Hal. 245-264. Diambil dari: <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/14027/0>
- Prasetyo, T.B., & Berantas, S. (2018). Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Vol. 4, No.2. Hal. 165-184. Diambil dari: <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/336/211>
- Pratama, C.D. (2020). *Upaya Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia*. Kompas.com. Diambil dari link: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/25/190408269/upaya-indonesia-menjadi-poros-maritim-dunia?page=all> (Diakses 6 Oktober 2020).
- Rusfiana, R. (2014). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Asean Defence Ministerial Meeting (ADMM). *Jurnal Pertahanan Agustus*. Vol. 4, No. 2. Hal. 145-163. Diambil dari: <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/335>
- Sirmareza, T. (2017). Aplikasi Soft System Methodology Dalam Analisis Diplomasi Angkatan Laut Indonesia Melalui Pengiriman Satgas Maritim TNI Pada Misi UNIFIL MTF. *Jurnal Politik Internasional*. Vol. 19 No. 1. Hal. 58-76. Diambil dari: <https://doi.org/10.7454/global.v19i1.122>
- Sudarsono, B.P., Mahroza, J., dkk. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Vol. 8, No.3. Hal. 83-102. Diambil dari: <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/441>
- Utomo, H., dkk. (2017). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Universitas Pertahanan*. Vol. 3, No.3. Hal. 63-88. Diambil dari: <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/168>

Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok. Jurnal Sosioreligius. Vol. 2, No.4. Hal. 13-41. Diambil dari: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/download/13321/8262>